

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PERPARKIRAN DI TEPI JALAN UMUM JALAN H.O.S. COKROAMINOTO PONOROGO

### Oleh

Risa Kusuma Wardani<sup>1</sup>; Suwardi<sup>2</sup>; Herning Suryo Sardjono<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Dinas  
Perhubungan Kabupaten Ponorogo, rhisakusuma@gmail.com.

<sup>2</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,  
suwardimapunisri@gmail.com

<sup>3</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
herningsuryo@gmail.com.

### Abstrak

Tesis berjudul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Perparkiran Di Tepi Jalan Umum Jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo dilatarbelakangi karena perkembangan pembangunan pada kawasan *face-off* HOS Cokroaminoto yang semakin cepat dan pesat ditambah dengan tingginya minat masyarakat yang ingin berwisata di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam mendeskripsikan hasil analisis menggunakan pendekatan teori George C. Edward III untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan.

Setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa kurangnya peran aktif pelaksana kebijakan, kurangnya pemberdayaan SDM karena faktor tidak proporsionalnya jumlah staf dan juru parkir serta ketersediaan anggaran menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perparkiran di Jalan HOS Cokroaminoto.

Namun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Perparkiran Di Tepi Jalan Umum Jalan HOS Cokroaminoto Ponorogo telah berjalan dengan baik. Hanya perlu adanya peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumberdaya. Selain itu, ketersediaan anggaran dan peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Kata kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

### Pendahuluan

Kabupaten Ponorogo mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan peningkatan perekonomian masyarakat saat ini menuntut laju pembangunan yang tinggi sehingga menimbulkan

peningkatan mobilitas penduduk. Hal ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan kendaraan di wilayah Kabupaten Ponorogo yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan pertumbuhan kendaraan yang semakin tinggi dan

adanya peningkatan pergerakan/mobilitas penduduk di wilayah Kabupaten Ponorogo menyebabkan semakin meningkatnya angka kendaraan yang terparkir di tepi jalan umum dari tahun ke tahun.

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.

Di Indonesia khususnya di Kabupaten Ponorogo, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan motor dan daya beli masyarakat semakin tinggi untuk membeli kendaraan pribadi.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan peraturan Daerah.

Kawasan Hos Cokro sekarang

menjadi kawasan CBD (Central Business District) yang membangkitkan atau menarik kendaraan bermotor yang membuat kawasan Hos Cokro semakin padat. Ini akan berdampak pada parkir di sekitar kawasan Hos Cokroaminoto yang harus adanya penataan di kawasan tersebut.

Dalam peranannya mengelola Retribusi Parkir, menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran, di bawah naungan Pemerintah Kota/Kabupaten. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Serta Perbup 95 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum menyatakan bahwa dengan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam pelaksanaan penarikan Retribusi parkir, sebagai salah satu langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Ponorogo sendiri menghadapi persoalan yakni, yaitu sering ditemuinya penarikan ganda ketika dilapangan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Infroman dalam

penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), dalam hal ini orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perparkiran pada Jalan HOS Cokroaminotot. Sesuai dengan desain penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data, untuk data primer diperoleh langsung dari informan penelitian berupa petikan hasil wawancara. Selanjutnya data data sekunder bersumber dari Dinas Perhubungan khususnya yang mengelola perparkiran, juru parkir serta masyarakat pengguna dan dokumn-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, 1) Interview, yaitu melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan perparkiran di Jalan HOS Cokroaminoto. Pihak-pihak yang dijadikan informan yaitu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; Kepala Bidang Lalu Lintas, Sarana dan Prasarana; Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub-Koordinator Perparkiran); Ketua Paguyuban Juru Parkir, dan masyarakat. 2) Observasi, yaitu dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan perparkiran 3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan perparkiran yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan. Peneliti mencatat data, dokumen yang berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga memperoleh bahan-bahan dari perpustakaan yang

berhubungan dengan penelitian.

Analisis data digunakan untuk pengolahan data dari hasil perolehan data menggunakan rumus atau aturan-aturan yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Analisis data dilakukan sebelum terjun kedalam lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Karena pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif maka prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat-kalimat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan peneliti. Peneliti menguji keabsahan atau kredibilitas data penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui wawancara yaitu membandingkan hasil wawancara koleksi data reduksi data kesimpulan/ verifikasi data dengan suatu dokumen yang berkaitan. Proses triangulasi sumber adalah proses dimana tahap akhir data yang telah dianalisis dan ditarik kesimpulan dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang perhubungan dan tugas pembantuan.

Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati No 95 Tahun 2017 Tentang Perparkiran di Tepi Jalan Umum Jalan HOS Cokroaminoto, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C.Edward III. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variable yang mempengaruhi

keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam mensosialisasikan tentang mengimplementasikan kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto. Ada 3 (tiga) indikator dalam komunikasi, yaitu : tranmisi, kejelasan dan konsistensi.

a) Transmisi

Tranmisi komunikasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dalam mengkomunikasi implementasi kebijakan terkait perparkiran di Jalan HOS Cokroaminoto dilakukan melalui rapat dengan berkomunikasi langsung tatap muka antar pelaksana kebijakan baik dari pihak dinas serta dari pelaksana dilapangan yaitu juru parkir guna membentuk pemahaman terhadap tujuan dari kebijakan perparkiran yang ada di Jalan HOS Cokroaminoto. Serta dilakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada juru parkir dan masyarakat, komunikasi langsung dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD), sedangkan sosialisasi tidak langsung melalui pamflet, baliho, website maupun media sosial yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

b) Kejelasan

Kejelasan, kejelasan informasi berperan penting dalam menunjang kelancaran informasi antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo selaku pembuat kebijakan dan bagian-bagiannya serta juru parkir dan masyarakat selaku pelaksana kebijakan di lapangan. Sosialisasi yang disampaikan kepada seluruh staf berupa petunjuk dan arahan agar pelaksanaan implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c) Konsistensi

Konsistensi, membantu komunikasi yang disampaikan dari pembuat kebijakan yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo kepada seluruh pelaksana kebijakan yaitu staf dan pelaksana kebijakan dilapangan serta masyarakat. Konsistensi komunikasi dapat mencegah timbulnya kebingungan dalam melaksanakan implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto.

2. Sumber Daya

Sumber daya aalah perangkat mutlak dalam implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto. Sumber daya yang mencukupi/memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya yang terkait dengan ketrampilan, dedikasi,

profesionalitas dan kompetensi. Implementasi yang maksimal atau efektif dan efisien mengindikasikan perlunya sumber daya yang cukup memadai, kurangnya perhatian dan komitmen pegawai dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto mengindikasikan terbatasnya sumber daya baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sumber daya anggaran.

a) Sumber Daya Manusia

Dari segi Sumber daya manusia dari total 6 (enam), 4 (empat) staf yang ada di seksi Perparkiran memiliki pendidikan yang berlatar belakang transportasi dan 2 (dua) orang berlatar pendidikan administrasi, sehingga dapat menghambat implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto. Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang membidangi parkir berbanding dengan jumlah titik dan juru parkir.

b) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran sangat diperlukan guna mendukung terlaksananya dengan implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto. Dukungan anggaran untuk program/kegiatan dalam dengan implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS

Cokroaminotomasih sangat minim. Masih kurangnya anggaran sebagai dana operasional keberlangsungan kegiatan perparkiran dalam mengimplementasikan Perbup 95 Tahun 2017. Selain itu efisiensi anggaran juga perlu diperhatikan.

c) Sumber Daya Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sumber daya fasilitas sarana dan prasarana sudah baik tetapi permasalahan ada pada anggaran kedepannya membutuhkan perawatan dalam kegiatan operasionalnya.

d) Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya kewenangan sebagai pengelola perparkiran dalam hal ini khususnya seksi parkir yang berada dalam bidang LLSP, Seksi tersebut secara teknis sudah menerapkan sesuai apa yang ada dalam Perbup 95 Tahun 2017 dimana sudah disosialisasikan terkait tariff serta larangan-larangan parkir di jam tertentu. Hal tersebut sudah berpedoman pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

3. Disposisi

Proses disposisi dalam implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto dituangkan dalam bentuk program kerja, diawali dengan penyusunan program

berdasarkan keadaan sebenarnya mengenai implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017. Disposisi berhubungan erat dengan komitmen para pelaksana kebijakan. Kurangnya komitmen inilah yang sampai saat ini masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto. Permasalahan ini dapat dapat diselesaikan dengan berbagai cara, yaitu dengan penetapan staf yang sesuai dengan bidang/unit kerja dan kompetensinya.

a) Penetapan Staf

Penetapan staf dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ponorogo dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Ponorogo untuk masing-masing PNS, hal ini menyebabkan penyebaran pegawai tidak merata di setiap bidang atau seksi. Untuk itu penjabaran Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja masing – masing PNS harus disusun dengan cermat agar kebutuhan pegawai di setiap unit kerja dapat terencana dengan baik. Mengingat pada seksi parkir ini memiliki staf yang sangat minimum dibandingkan dengan jumlah juru parkir dan titik parkir.

b) Insentif

Pemberian insentif bagi PNS telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam bentuk Tunjangan Perbaikan

Penghasilan (TPP) dengan dasar penilaian kinerja pegawai, absensi dan aktivitas kinerja pegawai setiap hari. Setiap implementor perlu mengkoordinasikan penjabaran program hingga tahap evaluasi karena itu implementor memerlukan kewenangan, informasi timbal balik melalui komunikasi dan koordinasi yang baik dan transparan dan terus menerus antara bidang-bidang atau satuan-satuan agar dapat memberikan diagnose masalah dan usulan solusi.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya – sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

a) *Standart Operation Procedure* (SOP)

*Standar Operation Procedure* (SOP) merupakan sebuah cara mengatur tata aliran pekerjaan agar masing-masing memiliki tugas serta tidak lagi mencampuri tugas – tugas yang lain, dalam implementasi

kebijakan. Penyusunan SOP harus menjadi pedoman bagi implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto di Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, SOP yang telah disusun bisa menjadi hambatan dalam implementasi sebuah kebijakan. Maka dari itu SOP yang telah disusun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana SOP itu menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi sudah terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan tugas dalam implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminotobaik secara internal maupun eksternal.

b) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja, ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self inters*) atau organisasi. Dari pengamatan peneliti, setelah penetapan sumber daya yang dilakukan oleh BKPSDM dan Dinas Perhubungan tanggung jawab setiap kegiatan yang dilakukan sudah cukup baik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto. Dimana setiap staf seksi

perparkiran sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya dimana ada staf yang bertugas di lapangan dengan mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada petugas teknis dilapangan yaitu juru parkir dan staf administrasi bertugas menyelesaikan administrasi sebagai penunjang kegiatan operasioan seksi dalam rangka tercapainya kebijakan tersebut.

Melihat keseluruhan uraian yang ada, maka hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto belum optimal menerapkan empat variabel teori George Edward III dalam implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto.

Untuk itu perlu pembenahan dan pengembangan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo melalui perbaikan fungsi, peningkatan produktifitas dan efisiensi yang akan berimplikasi terhadap keputusan mengadakan perubahan secara kultur, system penugasan, dan penyesuaian program dan anggaran serta penerapan system teknologi informasi komunikasi serta sumber daya manusia yang tepat guna mendukung terwujudnya sasaran dan tujuan dari implementasi kebijakan perparkiran sesuai Perbup 95 Tahun 2017 di Jalan HOS Cokroaminoto.

### Penutup

Berdasarkan teori Edward III implementasi kebijakan terdapat empat variabel sebagai faktor pembahasan dan dapat dijelaskan

bahwa hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Perparkiran Di Tepi Jalan Umum Jalan H.O.S. Cokroaminoto Ponorogo belum berjalan optimal.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Perparkiran Di Tepi Jalan Umum Jalan H.O.S. Cokroaminoto Ponorogo dari berbagai indikator telah dibahas dengan harapan ada kerjasama antara pelaku kebijakan yaitu pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan agar tujuan yang diharapkan tercapai.

Maka dari itu perlu dilakukan beberapa peningkatan seperti ditingkatkannya komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo baik berupa koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh pelaksana kebijakan dari staf dan kepada masyarakat terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Perparkiran Di Tepi Jalan Umum Jalan H.O.S. Cokroaminoto Ponorogo. Evaluasi harus dilakukan sebagai komunikasi lanjutan agar program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu, perlu dilakukan usulan kepada BKPSDM Kabupaten Ponorogo untuk penambahan staf baik dari perekrutan ataupun mutasi staf. Untuk staf yang tidak kompeten diikuti seminar atau pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sumberdaya yang dimiliki serta dilakukan pengusulan anggaran yang belum cukup dengan dilakukannya koordinasi antara pembuat kebijakan yaitu Kepala Dinas Perhubungan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mendukung

program/kegiatan yang menunjang kegiatan operasional perparkiran.

Perlu juga dilaksanakan penyusunan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja sebagai dasar penetapan staf agar kinerja masing-masing bidang/unit kerja dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan. Serta pelaksanaan *Standart Operating Procedure* (SOP) perlu dilakukan evaluasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo diusahakan berubah menjadi type A dimana selamaini masih type B, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendukung Implementasi Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Perparkiran Di Tepi Jalan Umum Jalan H.O.S. Cokroaminoto Ponorogo secara khusus dan di seluruh Kabupaten Ponorogo pada umumnya.

#### Daftar Pustaka

- Agustino, 2010, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, 2010, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 5 September 2022, hlm 139.
- Edward III, George C (edited), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London England, Goggin, Malcolm L et al. 1990, hln 194-154.
- HB. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian, Sebelas Maret University Pers, Surakarta.
- Matthew B.Miles & A.Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, UIP, Jakarta.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A.Sabatier, 1983, Implementation and Public



- Policy, New York, UI-Press.
- Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Bandung, CV Sinar Baru.
- Parson, Wayne, 2006, Public Policy, Pengantar Teori Praktek Analisis Kebijakan (Pemerintah Tri Wibowo Budi Santoso), Jakarta, Kencana.
- Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
- Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
- Purwanto dan Suistyasturi, 1991, Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara
- Santoso, Pandji. 2008, Administrasi Publik Teori dan aplikasi Good Governance.PT Refika Adityama, Bandung.
- Spradley dan Faisal. 1990. Format – format Penelitian Sosial. PT Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Van Meter dan Van Horn, 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. New York: Harvester-Wheatsheaf.
- Wibawa, Samodra 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori,Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Caps.